

MUSEUM SUBAK: MENJAGA IDENTITAS BUDAYA AGRARIS DI TENGAH GEMPURAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI BALI

Ida Bagus Brata^{1*}, Lianda Dewi Sartika²

^{1,2}Universitas Mahasaraswati Denpasar

*Email: ibbrata@unmas.ac.id

ABSTRAK

Museum sejatinya dapat diposisikan sebagai konstruksi identitas lokal dan nasional. Dalam perannya menjaga warisan sejarah lokal dan nasional, museum subak dapat menjadi lembaga otentifikasi identitas lokal dan nasional di masa silam dan sekaligus memproyeksikannya ke masa depan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana museum subak dapat dijadikan wahana untuk menjaga identitas budaya agraris di tengah maraknya alih fungsi lahan pertanian di Bali. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen yang selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: subak sebagai warisan budaya petani Bali yang bernilai luhur penting dilestarikan. Membangun kesadaran masa lalu bukan hanya bertujuan mempertahankan nilai-nilai lama, namun disertai pembinaan untuk mengembangkan terhadap unsur-unsur yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan masa kini maupun masa depan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memertahankan subak agar tetap eksis dalam mengantisipasi perkembangan global, seperti melalui wadah koordinasi antar subak dalam praktik pertanian di lapangan, terutama untuk menghindari timbulnya konflik karena air, koordinasi berkenaan dengan pola tanam, mendorong subak agar dapat berkembang menjadi suatu lembaga yang berorientasi agribisnis untuk meningkatkan pendapatan petani sangat penting dilakukan. Mengadakan program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan untuk meningkatkan sumber daya manusia anggota subak, khususnya pimpinan-pimpinan subak. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah adanya kebijakan yang melibatkan petani untuk dapat mencegah atau setidaknya dapat mengurangi percepatan alih fungsi lahan.

Kata Kunci: alih fungsi lahan, identitas budaya, museum subak

ABSTRACT

Museums can be positioned as constructions of local and national identity. In its role of preserving local and national historical heritage, the subak museum can be an institution that authenticates local and national identity in the past while projecting it into the future. This study aims to identify and describe the extent to which the subak museum can be used as a vehicle for maintaining agrarian cultural identity amidst the rampant conversion of agricultural land in Bali. Data were collected through observations, interviews and document study, and then processed descriptively and qualitatively. The results showed that Subak as a cultural heritage of Balinese farmers with noble values is important to preserve. Raising awareness of the past is not only about preserving old values, but also about developing elements that no longer meet current and future needs. Efforts can be made to maintain the subak in order to continue to exist in anticipation of global developments, for example through a forum for coordination between subak in agricultural practices in the field, especially to avoid the emergence of conflicts over water, coordination with regard to cropping patterns, encouraging the subak to develop into an agribusiness-oriented institution to increase farmers' income is very important. To improve the skills of the farmers through education, training and extension programmes.

Keywords: land conversion, cultural identity, subak museum

PENDAHULUAN

Dilihat dari aspek mata pencahariannya, terutama sebelum pariwisata merambah

pulau ini, mayoritas masyarakat Bali bermata pencaharian sebagai petani. Sejarah mencatat bahwa dengan situasi dan

kondisi yang masih serba terbatas di masa itu, petani Bali berhasil menciptakan suatu organisasi tradisional dengan tugas pokoknya mengatur pembagian air untuk pertanian secara adil dan merata yang disebut subak. Sistem subak yang dibangun dilandasi oleh falsafah-falsafah Hindu yang penuh kearifan ekologi, berbagai spesies tanaman dan hewan yang menjadi materi untuk mendukung pelaksanaan upacara dipastikan terpelihara atau dibudidayakan dengan baik, sebab secara berkesinambungan dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan ritual-ritual keagamaan untuk menjamin keberlanjutan kebudayaan agraris itu sendiri (Ariningsih & Nugroho, 2015).

Dewasa ini subak sedang menghadapi bermacam tantangan, lebih-lebih dalam menyongsong hadirnya pariwisata sebagai bagian dari globalisasi. Dampak akibat industri pariwisata kalau tidak diantisipasi dengan baik dapat berpotensi mengancam keberlanjutan sistem subak itu sendiri. Beberapa tantangan nyata yang dihadapi subak, seperti: semakin sempitnya areal persawahan akibat alih fungsi lahan, ketersediaan air untuk irigasi semakin terbatas termasuk di dalamnya masalah pencemaran sumber daya air, persaingan dalam pemasaran hasil produksi petani semakin kompetitif, dan yang amat mengkhawatirkan adalah rendahnya minat anak-anak muda untuk bekerja sebagai petani (Sutawan, 2012).

Seiring dengan kehadiran dan perkembangan sektor pariwisata, dengan didukung kemudahan fasilitas perijinan investasi, maka sektor pariwisata mengalami kemajuan pesat, namun pada kenyataannya berdampak langsung terhadap semakin banyaknya fasilitas akomodasi, objek, dan kegiatan yang justru mengancam dan mengintervensi sektor

pertanian. Dampak ini tampak jelas di berbagai kawasan di Bali, terlebih lagi tanah-tanah yang ada di pinggir jalan raya dan tanah-tanah yang memiliki panorama alam yang eksotik sehingga sangat menarik bagi investor dalam berinvestasi untuk membangun berbagai akomodasi pariwisata. Kecenderungan terjadinya alih fungsi lahan yang produktif semakin meningkat, akibatnya areal persawahan menjadi semakin berkurang. Jika hal ini terus berlangsung dikhawatirkan dapat mengancam eksistensi subak itu sendiri (Windiani & Nurul, 2016).

Bersamaan dengan itu muncul penilaian bahwa ketika sistem perekonomian agraris dinilai tidak menguntungkan, lambat laun alih fungsi lahan yang produktif cenderung semakin meningkat dan umumnya lahan pertanian yang dikorbankan, akibatnya areal sawah menjadi semakin berkurang. Ada anggapan bahwa sawah bukan lagi satu-satunya lapangan kerja, oleh karena sektor pariwisata di Bali menawarkan berbagai pilihan, harapan, dan peluang akan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Berawal dari sini muncul kecenderungan masyarakat petani beralih ke sektor lain semakin tampak, ditambah lagi berbagai potensi yang tumbuh dan berkembang di daerah bersangkutan. Fenomena seperti ini berpeluang besar sektor pertanian akan ditinggalkan masyarakat (Kapantow et al., 2015).

Orientasi terhadap lapangan kerja cenderung menimbulkan sikap-sikap yang memandang bahwa jenis pekerjaan membedakan status sosial seseorang. Terdapat anggapan pekerjaan sebagai petani dinilai lebih rendah dari sektor pekerjaan lain. Kesan sebagai petani identik dengan kemiskinan. Timbulnya persepsi atau anggapan seperti ini, ternyata berpengaruh kuat terhadap kesadaran

budaya tentang tata ruang, seperti munculnya suatu konsepsi bahwa ruang diartikan sebagai wadah untuk mencari dan mendapatkan uang. Persepsi dan anggapan seperti ini menimbulkan suatu dorongan yang amat kuat terjadinya alih fungsi lahan pertanian (Pratama et al., 2021).

Fungsi sawah kemudian mengalami perubahan dari fungsi sosial, budaya, ekonomi, dan religius menjadi hanya sebagai tempat produksi semata. Ada kecenderungan bahwa sawah hanya dinilai dari segi nilai-nilai nyata (*tangible values*), seperti hanya dilihat dari hasil panen dan nilai dari ekonomis lahan semata. Padahal budaya agraris dalam sistem subak sarat identitas budaya dengan berbagai kearifan di dalamnya dalam wujud nilai-nilai yang tidak nampak (*intangible values*), seperti fungsi sawah dalam konservasi air dan tanah, keanekaragaman hayati, suplai oksigen, dan sebagainya. Ketika hasil panen menurun, nilai lahan untuk keperluan lain meningkat, maka kecenderungan yang akan terjadi adalah jual beli dan alih fungsi lahan. Akibatnya, empat fungsi tanah akan mengalami panorama bahkan hilang, seperti : 1) hubungannya dengan agama, yakni dalam pelaksanaan upacara; 2) sebagai tempat pemukiman orang desa atau banjar; 3) hubungannya dengan kekerabatan atau keluarga; dan 4) sebagai sumber mata pencaharian (Saputra, 2022).

Permasalahan alih fungsi lahan merupakan isu yang terus meningkat jumlahnya seiring dengan pertumbuhan pariwisata. Hal ini sejalan dengan tuntutan penyediaan sarana pendukung pariwisata harus bertambah untuk memberikan daya tampung bagi wisatawan yang datang ke pulau ini. Akibatnya, konflik atau benturan antara perkembangan kepariwisataan dengan upaya pelestarian subak tidak mungkin dihindari. Perkembangan

pariwisata membutuhkan ruang dan tempat untuk membangun berbagai fasilitas dan akomodasi pariwisata, seperti hotel, restoran, fasilitas jalan menuju objek, ruang berusaha, perumahan bagi karyawan sehingga terjadi konversi lahan yang sangat besar. Akibatnya sangat banyak tanah-tanah pertanian yang dikorbankan untuk membangun fasilitas pariwisata. Ancaman dari perkembangan pariwisata yang begitu kuat adalah konversi lahan pertanian, yang nampaknya tidak terkendali (Sudipa et al., 2020). Berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bali (2017) dijelaskan bahwa lima tahun terakhir (2013-2017) rata-rata alih fungsi lahan pertanian sekitar 550 hektare per tahun. Sementara menurut Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bali alih fungsi lahan khususnya pertanian di tahun 2017 diperkirakan sebesar 1.13% dari luas area tanam atau lebih tinggi dari batas yang diatur rencana tata ruang wilayah (Saputra, 2022).

Kekhawatiran yang timbul kemudian adalah daya tawar subak sangat lemah, sehingga pola penguasaan lahan tidak lagi menunjang berfungsinya sistem subak dengan baik. Tidak terbatas ancaman hanya dari perkembangan kepariwisataan saja, namun dikhawatirkan berpengaruh terhadap perilaku anggota subak (*krama subak*). Keterlibatan anggota *krama subak* baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kepariwisataan, terutama besarnya pendapatan yang mereka peroleh dari sektor ini, dikhawatirkan dapat memperlemah kesadaran *krama subak* terhadap fungsi sosial, budaya, religius bahkan terhadap dimensi ekologisnya, sehingga dapat mengancam kekokohan kebersamaan sebagai *krama subak* di dalam mematuhi aturan-aturan *subak*, demikian

juga dalam memenuhi kewajiban mereka sebagai *krama subak*.

Kajian dalam tulisan ini berusaha menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu: (1) apakah membangun kesadaran masa lalu itu penting bagi masa depan; (2) upaya apa yang perlu ditempuh untuk dapat menjaga identitas budaya agraris di tengah ancaman alih fungsi lahan pertanian; (3) apakah tinggalan masa lalu yang merefleksikan identitas suatu kelompok penting direvitalisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk dapat menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong, 2017). Metode seperti ini menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau narasi lisan dari hasil observasi dan pengamatan di sekitar museum subak. Kegunaan metode kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini bersumber pada permasalahan yang akan dikaji yaitu dari informasi berkenaan dengan eksistensi museum subak yang akan dikaji. Kajian yang dilakukan adalah untuk memahami dan mendeskripsikan secara sistematis dan faktual berkenaan dengan suatu fakta, sifat, dan hubungan yang timbul berkaitan dengan peran museum subak dalam menjaga eksistensi budaya agraris di tengah gempuran alih fungsi lahan pertanian. Atas dasar itu, maka kajian dalam tulisan ini tergolong jenis kajian deskriptif-eksploratif, yaitu untuk mengidentifikasi identitas kebudayaan agraris melalui deskripsi secara mendalam dan utuh tentang artefak atau berbagai jenis alat-alat pertanian yang dikoleksi di Museum subak sebagai salah satu ciri identitas budaya agraris.

Untuk memperoleh informasi, data, dan fakta yang objektif penelitian ini dilakukan secara langsung melalui pengamatan mendalam berkenaan dengan permasalahan yang akan dikaji. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar/foto, benda koleksi, dan situs subak. Dengan demikian akan diperoleh data yang sebenarnya sehingga dapat menambah wawasan berpikir di dalam mendekati permasalahan penelitian. Data dan sumber data untuk kajian ini terdiri dari data primer dan data skunder. Data primer dikumpulkan dari lapangan dengan mewawancarai petugas museum Subak, pengunjung, dan orang-orang yang pernah berkunjung ke museum subak, serta bersumber pada kehidupan riil para petani anggota subak. Sementara data skunder dikumpulkan melalui kajian pustaka, hasil seminar dan loka karya, kajian arsip, pengamatan alat-alat pertanian yang menjadi koleksi museum, dan media sosial melalui jaringan internet. Pengumpulan data melalui teknik observasi nonpartisipasi juga dilakukan, peneliti memosisikan diri tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.

Sebagai lokus kajian dilaksanakan di Museum Subak, dengan lokasi yang sangat strategis di lintasan jalan Denpasar menuju Gilimanuk, tepatnya beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 56, Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. Alasan museum subak ini dijadikan sebagai lokasi penelitian, karena lokasinya dengan mudah dapat diakses, sudah dikenal luas di kalangan masyarakat, dan memiliki koleksi alat-alat pertanian cukup lengkap dengan dilengkapi miniatur sistem irigasi subak dengan hamparan sawahnya.

Setelah data dikumpulkan, tahapan berikutnya, yaitu analisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif

(Moleong, 2017) yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, untuk selanjutnya memutuskan apa yang dapat diceritakan atau dinarasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bali begitu terkenal di kalangan wisatawan mancanegara karena panorama alamnya, keindahan pantai dan lagunanya, serta kultur budayanya yang kaya, seperti sistem subak dalam bingkai budaya agraris. Budidaya padi di sawah dengan menggunakan sistem irigasi merupakan suatu kegiatan yang tidak terpisahkan dari eksistensi subak. Sejatinya kegiatan bercocok tanam di sawah sudah dikenal cukup lama oleh masyarakat Bali. Dari perspektif sejarah, keterangan tertulis mengenai praktik bertani masyarakat Bali untuk pertama kali ditemukan dalam Prasasti Sukawarna¹ yang berangka tahun 882 Çaka (Kumarananda, 2022). Di dalam prasasti tersebut ditemukan istilah ‘*huma*’, kata ini pada masa itu diduga digunakan untuk menyebut ladang berpindah. Selanjutnya dalam prasasti Trunyan yang berangka tahun 891 Çaka, ditemukan istilah “*serdanu*” yang diduga untuk menyebut orang yang mengatur urusan air danau.

Dalam prasasti Pandak Badung yang berangka tahun 1071 M ditemukan istilah “*kasuwakan*” yang kemudian menjadi “*kasubakan*”. Pada Prasasti Klungkung yang berangka tahun 1072 nama subak disebut dengan istilah “*subak rawas*”. Dalam versi yang lain istilah “*kasuwakan*” yang diartikan sebagai daerah/kawasan subak ditemukan pada beberapa prasasti lain, misalnya: prasasti Trunyan (881M),

Prasasti Sukawana (882 M), Prasasti Bebetin A (896 M), Prasasti Buwahan, Timpag dan Bugbug (Suadnya,1990). Dalam Prasasti Bebetin A (896 M) dan Prasasti Batuan (1022 M) dijelaskan tentang adanya kelompok pekerja yang memiliki keahlian khusus yang berkaitan dengan aktivitas pertanian basah di Bali, seperti keahliannya dalam membuat “*awungan*” (terowongan) air. Orang yang ahli dalam membuat terowongan disebut *undagi pengarung*. Bukti ditemukannya terowongan air tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Bali telah mengenal mekanisme mengelola irigasi pada sekitar abad ke-10.

Kata subak juga ditemukan dalam naskah lontar Bali *Kawit Babad Hindu Wenten Ring Bali*, yang menyebutkan: “*Sang mikukuhang sawah kawastanin subak, sang mikukuhang toya kawastanin pekaseh, ika mawenang mangepah toya punika*”, artinya: orang yang aktif menggarap sawah disebut anggota subak, yang mengatur pembagian air disebut *pekaseh*, semuanya bertanggung jawab atas pembagian air di antara anggota subak.

Berdasarkan bukti-bukti di atas, sesungguhnya belum nampak jelas bagaimana proses awal terwujudnya suatu organisasi pengairan yang disebut subak di Bali. Berdasarkan pada topografi daerah Bali yang berbukit dengan hutannya yang lebat, lembah yang curam dan berliku, sumber mata air yang terletak jauh di bawah, rasanya sangat sulit petani kala itu untuk mendistribusikan air untuk mengairi sawah-sawah yang mereka buat. Namun tidak terbantahkan organisasi pengairan tradisional seperti subak itu faktanya ada, kendati sangat sederhana. Bertumpu pada kondisi yang ada, maka diyakini dengan kearifan lokal yang dimiliki permasalahan dalam membudidayakan tanaman padi

dapat diatasi dengan cukup baik. Misalnya dengan membuat *telabah* (saluran air), membangun *empelan* (bendungan/dam), *awungan* (terowongan), *tembuku* (bangunan pembagi air), akhirnya air sampai ke sawah petani. Kontur tanah dengan kemiringan yang relatif besar diatasi dengan dibuatkan *sengkedan* (berteras/bertingkat/*terassering*) m,kyang tanpa disadari membentuk hamparan persawahan seperti bentang alam yang begitu mempesona bagi siapa saja yang memandangnya.

Sistem irigasi dalam kelembagaan subak pada hakikatnya sudah menyatu dengan kehidupan sosio-kultural masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu. Subak merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Bali yang demikian kaya dengan berbagai sistem nilai terimplikasi di dalamnya. Subak merupakan suatu sistem pengairan sawah tradisional yang ada di daerah Bali. Sebagai sebuah sistem pengairan tradisional lembaga ini telah mendapat pengakuan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Namun eksistensi subak dewasa ini dihadapkan pada permasalahan alih fungsi lahan yang semakin marak. Subak sebagai sebuah kearifan lokal tengah ada di persimpangan jalan “hidup segan, mati tidak rela”. Tidak banyak orang yang suka bertani. Generasi muda lebih asyik memainkan fitur-fitur *gadget*, mayoritas di antara mereka beranggapan bahwa dunia medsos dan handphon lebih menjanjikan. (Windiani (2016) menyebutkan jumlah petani di Bali ±500.000 orang dan cenderung berkurang rata-rata 2% sebelum pandemi covid-19. Sementara subak yang masih bertahan menurut data Dinas Kebudayaan Provinsi Bali tahun 2018, sejumlah 2.726 subak dari 1.493 desa pakraman. Jumlah subak tersebut terdiri

dari 1.596 subak (sawah) dan 1.130 subak abian. Data ini merupakan kompilasi dari data Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun 2018 dari Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa di wilayah dinas dan data hibah tahun 2017 dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali untuk di wilayah kelurahan.

Alih fungsi lahan menimbulkan permasalahan degradasi alam yang berpotensi melemahkan harmonisasi antara masyarakat dan lingkungan di sejumlah subak. Degradasi alam yang terjadi di subak akibat konversi lahan, alih profesi, ekonomi yang lemah dan kurangnya ketertarikan kalangan muda untuk melanjutkan eksistensi subak. Secara fisik keberadaan sistem irigasi subak di Bali telah mulai mengalami ancaman. Alih fungsi lahan di Bali mencapai rata-rata 750 ha/tahun. Meski arealnya menurun, namun aktivitasnya sebagai subak masih tetap dipelihara. Misalnya subak di kawasan wisata Ubud Kabupaten Gianyar, arealnya banyak beralih fungsi menjadi hotel dan restoran, karena dianggap lebih menguntungkan secara ekonomis. Sebagai contoh dicatat Subak Muwa yang luas sebelumnya 40 ha, kini berkurang menjadi 4 ha (Astina et al., 2021). Meskipun areal subak semakin mengecil, namun anggota subak yang bersangkutan tetap menyelenggarakan kegiatan subak sesuai filosofi *tri hita karana* (THK), tetapi dengan penyelenggaraan yang tidak optimal. Sedangkan areal subak yang telah beralih fungsi menjadi kegiatan kepariwisataan, akan terlepas dari kegiatan lembaga subak, dan selanjutnya menyatu sebagai suatu kegiatan lembaga ekonomi.

Dalam rangka memperkuat kelembagaan subak, kiranya perlu dilakukan berbagai upaya agar lembaga subak tetap dapat eksis dalam mengantisipasi perkembangan global.

Adanya wadah koordinasi antar subak dalam praktik pertanian di lapangan terutama untuk menghindari timbulnya konflik tentang air, koordinasi berkenaan dengan pola tanam. Mendorong subak agar dapat berkembang menjadi suatu lembaga yang berorientasi agribisnis untuk meningkatkan pendapatan petani sangat penting dilakukan. Mengadakan program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan untuk meningkatkan sumber daya manusia kepada anggota subak, terutama para pemimpin subak. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya kebijakan yang melibatkan petani untuk dapat mencegah atau setidaknya dapat mengurangi percepatan alih fungsi lahan (Lestari & Ginting, 2021).

Kekhawatiran akan hilangnya subak yang demikian kaya dengan berbagai nilai-nilai kearifan di dalamnya maka penting menggugah kesadaran masa lalu akan hakikat dari sistem subak itu sendiri (Brata et al., 2017). Kekhawatiran akan eksistensi subak di masa mendatang, jauh sebelumnya sudah dipikirkan oleh I Gusti Ketut Kaler seorang tokoh sekaligus pakar adat dan agama Hindu di Bali. Gagasan awal yang ditawarkan adalah mempertahankan salah satu wilayah subak yang masih asri dan lestari untuk dijadikan semacam cagar budaya. Di kawasan cagar budaya ini dibangun pula tempat penyimpanan alat atau peralatan dan benda-benda yang ada kaitannya dengan usaha tani serta kehidupan subak, termasuk di dalamnya dibangun rumah tradisional petani yang mengikuti segala aturan *asta bumi* dan *asta kosala-kosali*, serta tata ruang dan tata letak menurut tradisi masyarakat di Bali. Gagasan itu diberi nama Cagar Budaya Museum Subak yang diharapkan dapat dijadikan wahana untuk mengenang memori masa lalu tentang budaya petani

Bali. Ide cemerlang ini disambut baik oleh Gubernur Bali kala itu Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, dengan diresmikannya Museum Subak 13 Oktober 1981 dan dibuka untuk kalangan umum, kemudian menjadi Museum Subak yang kita kenal keberadaannya sampai saat ini (Joseph & Wibowo, 2015).

Tujuan mendirikan museum Subak adalah untuk melestarikan warisan budaya bangsa yaitu lembaga adat Subak, sehingga nantinya dapat diperkenalkan kepada generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dalam kaitan ini posisi museum subak sangat penting dalam konstruksi identitas petani Bali. Melalui otoritas yang dimiliki dalam kaitan warisan sejarah lokal, museum subak dapat menjadi lembaga otentifikasi identitas lokal dan nasional di masa lampau untuk diproyeksikan ke depan. Melalui museum subak berbagai proses kesejarahan budaya petani ditampilkan sehingga dapat dijadikan cerminan dan pembelajaran untuk memperkuat jatidiri bangsa. Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa subak merupakan sistem tata kelola irigasi tradisional yang menjadi pilar kebudayaan masyarakat Bali. Subak sejatinya dapat diposisikan sebagai salah satu benteng peradaban Bali yang begitu kaya dengan berbagai kearifan di dalamnya. Museum subak dapat dijadikan sebagai wahana pembelajaran masyarakat Bali dalam menjaga kontinuitas air irigasi, memelihara keseimbangan kondisi lahan pertanian, memupuk solidaritas sosial, menjamin keberlanjutan budaya agraris, menghargai dan menjaga lingkungan, dan selalu membina hubungan harmonis dalam dinamika subak, seperti yang diajarkan melalui filosofi *Tri Hita Karana*.

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan permuseuman di tanah air,

Direktorat Museum mengelompokkan museum menjadi museum umum, museum khusus, dan museum Lokal. Selanjutnya di tahun 1975 disederhanakan lagi menjadi Museum Umum, Museum Khusus, dan Museum Pendidikan. Pada tahun-tahun selanjutnya perhatian pemerintah terhadap museum semakin baik. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum dijelaskan museum adalah lembaga, tempat menyimpan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda bukti material hasil budaya manusia, alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya manusia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2015 tentang Museum pada bab I ayat 1 (1) disebutkan museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Dalam PP tersebut pada pasal 1 (3) juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan koleksi museum adalah Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya dan/atau Bukan Cagar Budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata. Dengan demikian museum memiliki peran dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan nasional khususnya sistem subak sebagai bagian budaya agraris yang menjadi jati diri bangsa.

Museum tidak hanya sekedar menyimpan, merawat, dan melindungi benda koleksinya untuk bahan pameran melainkan sebuah lembaga kebudayaan

yang dituntut untuk menyediakan dan memberi pengetahuan dan pengalaman yang berorientasi pada pengembangan masyarakat. Dalam kaitan ini museum dapat dipahami sebagai tempat penyimpanan pengetahuan tentang masa lampau, baik *tangible* (nyata), *intangible* (tidak nyata), dan abstrak yang pada gilirannya dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat secara berkelanjutan (Brata et al., 2022). Atas dasar itulah museum dapat berfungsi sebagai institusi pendidikan yang mampu menyadarkan masyarakat akan identitas mereka, memperkuat sekaligus menjaga identitas budaya agraris yang diwariskan oleh generasi terdahulu.

Museum subak itu didirikan sebagai wujudantisipasi ketika persawahan hilang maka sistem subak juga ikut hilang. Hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa subak yang ada di daerah perkotaan sudah hilang, namun dengan dibangunnya museum subak ada harapan bahwa budaya agraris sebagai identitas budaya yang penuh kearifan di dalamnya dapat dipelajari dan dikenali oleh generasi penerus kebudayaan Bali

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, beberapa hal dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Subak sebagai warisan budaya petani Bali yang bernilai luhur penting dilestarikan untuk menjaga identitas budaya petani dalam sistem subak. Bukan hanya mempertahankan nilai-nilai lama, namun penting diadakan pembinaan sekaligus mengembangkan terhadap unsur-unsur yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan masa kini maupun masa datang sehingga dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kebutuhan. Penting dilakukan berbagai

upaya agar lembaga subak sebagai sistem pengairan tetap dapat eksis dalam mengantisipasi perkembangan global, seperti membangun wadah koordinasi antar subak dalam praktik pertanian di lapangan terutama untuk menghindari timbulnya konflik karena masalah air, koordinasi berkenaan dengan pola tanam; 2) Mendorong subak agar dapat berkembang menjadi suatu lembaga yang berorientasi agribisnis untuk meningkatkan pendapatan petani sangat penting dilakukan; 3) Mengadakan program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan untuk meningkatkan sumber daya manusia kepada anggota subak, terutama kepada pimpinan subak; dan 4) Adanya kebijakan yang melibatkan petani untuk dapat mencegah atau setidaknya dapat mengurangi percepatan alih fungsi lahan. Untuk mengantisipasi dan sekaligus menjaga identitas budaya agraris maka dibangunlah cagar budaya museum subak sebagai tempat penyimpanan alat atau peralatan dan benda-benda yang ada kaitannya dengan usaha tani serta kehidupan subak, termasuk di dalamnya dibangun rumah tradisional petani dan hamparan sawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariningsih, I. G. A. A., & Nugroho, S. (2015). Pelestarian Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Museum Subak sebagai Daya Tarik Wisata Budaya di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 3(2). <http://portalgaruda.fti.unissula.ac.id/?ref=browse&mod=viewarticle&article=458729>
- Astina, I. W. A. A. B., Mekarini, N. W., & Jokosaharjo, S. (2021). Strategi Pengembangan Museum Subak Tabanan sebagai Daya Tarik Wisata Budaya. *Journal of Tourism and Interdisciplinary Studies (JoTIS)*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.51713/jotis.v1i1.51>
- Joseph, A., & Wibowo, I. (2015). Persepsi Kualitas Layanan Museum Di Indonesia: Sebuah Studi Observasi. *Jurnal Manajemen*, 15(1), 1–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/jmm.v15i1.24>
- Kapantow, G. H. M., Kumaat, R. M., & Sondak, L. W. T. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Cocos*, 6(3), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.35791/cocos.v6i3.6919>
- Ketut, I., Ni, S., Gde, G. A., Martiningsih, E., Swarbawa, J., Bagus, I., Mantra, N., Sri, C., Yuwono, M., Suparsa Dan I, N., Widnyana, W., Gde, W., Made, W. I., Wijaya, H., Wahyu, W., Udytama, W., Kardi, C., Dan, N., Tariningsih, D., ... Agung, A. P. (2017). *Strategi Mengurangi Alih Fungsi Lahan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan* (1 ed.). Universitas Mahasaraswati Press. www.unmas.ac.id
- Kumarananda, I. G. V. (2022). *Asal Mula Sistem Subak di Bali*. <https://distanpangan.baliprov.go.id/wp-content/uploads/2022/06/1.-History-of-Subak-Indonesia.pdf>
- Lestari, N. P. D. N., & Ginting, A. H. (2021). Upaya Penanggulangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Dengan Pemberdayaan Krama Subak. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP)*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v3i1.2012>
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (37 ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Putu Gede Adhi Krisna Kartika Pratama, I., & Wulandira Sawitri Djelantik, A. (2021). Faktor-faktor Mendorong Alih Fungsi Lahan dan Dampaknya terhadap Produksi Beras di

- Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.
Jurnal Agribisnis dan Agrowisata,
10(2), 551.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/JAA>
- Saputra, H. N. (2022, Juni 22). *Alih Fungsi Lahan Jadi Tantangan Bali Jaga Daya Tahan Pangan*. BaliBisnis.com.
- Sudipa, N., Mahendra, M. S., Adnyana, W. S., & Pujaastawa, I. B. (2020). Alih Fungsi Lahan di Kawasan Pariwisata Nusa Penida. *JURNAL SAINS TEKNOLOGI & LINGKUNGAN*, 6(2), 182–191.
- <https://doi.org/10.29303/jstl.v6i2.167>
- Sutawan, N. (2012). Eksistensi Subak di Bali: Mampukah Bertahan Menghadapi Berbagai Tantangan. *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 1(2), 1–10.
- Windiani, & Nurul, F. (2016). Menggunakan metode etnografi dalam penelitian sosial. *Dimensi Jurnal Sosiologi*, 9(2), 87–92.
<https://doi.org/10.21107/djs.v9i2.3747>